



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
UNIT KERJA : RSUD MUNTILAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNA ERNAWATI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 238685

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 467.145.000

1. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.705.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/160 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
3. Tanah Seluas 748 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 13.440.000
4. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 103.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 38.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 50.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 186.544.263

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 769.689.263

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 769.689.263



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.